

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Harmonis •oyal • Adaptif • Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk komitmen dan cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik.

Selanjutnya dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja di masa mendatang dan bermanfaat bagi kita semua.

Gresik, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPAEN GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19720411 199101 1 001

RINGKASAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 - 2026.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023. Sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari dua sasaran dimana sasaran I terdiri dua indikator kinerja yang diampu oleh dua urusan yaitu urusan keuangan (Bidang Anggaran Daerah dan Bidang Perbendaharaan) dan urusan aset (Bidang Pengelolaan Aset Daerah) sedangkan sasaran II terdiri dari satu indikator kinerja yang diampu oleh 3 bidang urusan pendapatan (Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB, Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah).

Capaian kinerja sasaran strategis I “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” dengan indikator kinerja Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan telah mencapai realisasi sebesar 100,00% sesuai target yang telah ditetapkan hal ini berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi, dan pada indikator kinerja Persentase Data Aset yang Akurat telah mencapai realisasi kinerja sebesar 111,00% yang berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Pada capaian kinerja sasaran strategis II “Meningkatnya Pendapatan Daerah” dengan indikator kinerja Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah telah mencapai realisasi kinerja sebesar 1,48% yang masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 3,17% masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan persentase yang dihasilkan hanya 46,69%.

Dengan demikian dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan ada yang dilaksanakan dengan baik karena realisasinya sesuai target untuk sasaran strategis I yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan, untuk sasaran strategis II belum dapat dilaksanakan dengan baik yaitu Meningkatnya Pendapatan Daerah realisasinya masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan karena Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah masih 46,69%.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi	1
1.2 Personil/Pegawai	4
1.3 Dukungan Anggaran	5
1.4 Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	5
1.5 Permasalahan Utama	6
1.6 Sistematika Pelaporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	15
2.2 Cascading Kinerja	15
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
2.4 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
CAPAIAN KINERJA BPPKAD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023	19
3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Perjanjian Kinerja	19
3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	20
3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026.....	21
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi (Jawa Timur).....	22
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan.....	23
3.6 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan	24
3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Kinerja Yang Telah Dicapai.....	24
SASARAN I (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	26
SASARAN II (Meningkatnya Pendapatan Daerah)	28

BAB IV	PENUTUP	30
4.1	Kesimpulan	30
4.2	Saran	31
	Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada APBD	32
	Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada Perubahan APBD.....	34



BAB I

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Kepala badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 224 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

1.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

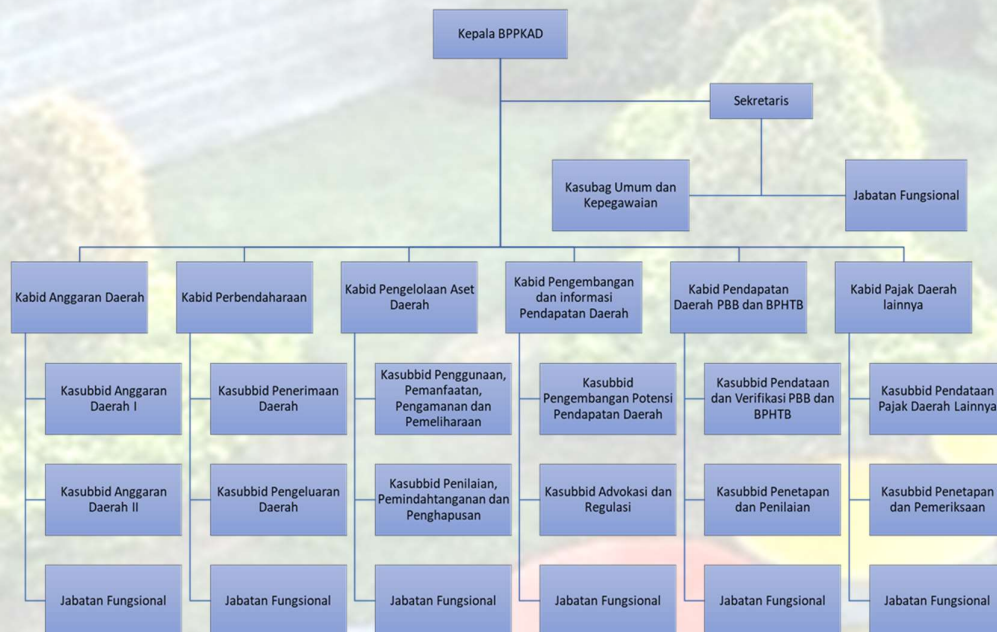
- Membantu bupati dalam merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan kegiatan administrasi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

- Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Fungsi

- Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan bagan yang ada diatas terdiri dari 6 (enam) bidang dan sekretariat seperti berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Anggaran Daerah I;
 2. Subbidang Anggaran Daerah II;
 3. Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Subbidang Penerimaan Daerah;
 2. Subbidang Pengeluaran Daerah;
 3. Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan;
 2. Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan;
 3. Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pengembangan Potensi Pengembangan Daerah;
 2. Subbidang Advokasi dan Regulasi;
 3. Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 1. Subbidang Pendataan dan Verifikasi PBB dan BPHTB,
 2. Subbidang Penetapan dan Penilaian,
 3. Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari:
 1. Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya,
 2. Subbidang Penetapan dan Pemeriksaan,
 3. Jabatan Fungsional.

Visi

Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdayasaing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul karimah

Misi

- Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik
- Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD
- Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu
- Melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan transparan, akuntabel dan tertib
- Meningkatkan pendapatan asli daerah

1.2 Personil / Pengawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 106 orang yang terdistribusikan ke dalam unit-unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian PNS BPPKAD Kabupaten Gresik

No.	Unit Kerja	Jumlah Personil	Jenis Kelamin	
			Laki - laki	Perempuan
1	Kepala Badan	1	1	-
2	Sekretariat	16	8	8
3	Bidang Pajak Daerah Lainnya	13	8	5
4	Bidang PBB dan BPHTB	20	18	2
5	Bidang Pengembangan Informasi	7	4	3
6	Bidang Anggaran	10	2	8
7	Bidang Perbendaharaan	18	5	13
8	Bidang Pengelolaan Aset	11	6	5

9	UPT Pelayanan Pajak Wilayah Gresik	6	4	2
10	UPT Pelayanan Pajak Wilayah Bawean	4	3	1
	Jumlah	106	59	47

Sumber : Subbag.Umum dan Kepegawaian BPPKAD Kabupaten Gresik Per 1 Februari 2024

1.3 Dukungan Dana

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar Rp. 953.415.921.481,- (*Sembilan ratus lima puluh tiga milyar empat ratus limabelas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*) dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 sebesar Rp.1.011.041.623.743,- (*Satu trilyun sebelas milyar empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupah*) ada penurunan sebesar Rp.57.625.702.262,- (*Lima puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*) atau 5,20 %.

1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor 700/1415/437.72/2023 Tanggal 5 Mei 2023 atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022. Berikut ini dapat kami sampaikan upaya perbaikan sebagai tindaklanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud :

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Agar Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik memerintahkan semua pegawai membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022.	Seluruh ASN di lingkungan BPPKAD telah menyusun SKP tahun 2022 dan pada tahun 2023 Kepala BPPKAD melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian telah memerintahkan seluruh ASN untuk menyusun SKP tahun 2023 di bulan Februari.

2	Agar pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi penyesuaian (<i>refocusing</i>) anggaran.	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penganggaran. Ada penambahan anggaran sebesar 7,8 persen. Dari aplikasi SIAKRI dapat diketahui Capaian kinerja BPPKAD tahun 2022 sebesar 194,05%.
3	Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>benchmark</i> Kinerja).	Terkait realisasi kinerja yang ada dalam BPPKAD Kabupaten Gresik khususnya dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah telah dibandingkan dengan tingkat Pengelolaan Keuangan Provinsi Jawa Timur.
4	Agar informasi kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Informasi kinerja telah dijadikan dasar dalam perubahan budaya kinerja organisasi. Melakukan evaluasi berkala untuk Capaian Kinerja setiap bulan, dan digunakan sebagai dasar acuan terkait budaya kinerja organisasi. Terutama untuk peningkatan pendapatan daerah.

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) antara lain:

Tabel 3.1. Matriks Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPKAD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif.			
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Penyampaian KUA-PPAS dan Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	1. Penyusunan KUA – PPAS menggunakan aplikasi SIPD, baru dapat dilakukan setelah tahapan RKPD selesai dan data transfer ke tahapan KUA-PAS	1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		2. Penyampaian Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	2. Proses entri RKA-SKPD menggunakan aplikasi SIPD yang seringkali mengalami gangguan	2. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		3. Terdapat Ketidak tepatan dalam penganggaran belanja kegiatan	3. Kurangnya pemahaman dan kompetensi SDM OPD dalam hal perencanaan penganggaran	3. Penerbitan SE Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Sosialisasi / FGD tentang Regulasi di bidang penganggaran
		4. Implementasi SIPD belum bisa dilaksanakan sepenuhnya	4. Koordinasi dengan pusat tidak berjalan cepat	4. Adanya penyesuaian SIPKD terhadap perkembangan sistem pengelolaan keuangan

		5. Kesalahan pengajuan SPM dan keterlambatan penyerahan bukti setoran dari OPD	5. Kurangnya pengetahuan dan ketelitian pengelola keuangan OPD	5. Adanya verifikasi
		6. Molornya pelaksanaan kegiatan akibat keterlambatan penetapan bendahara dan KPA dari OPD	6. Keterlambatan surat usulan bendahara dan KPA dari OPD serta proses penetapan SK yang cukup lama	6. Permintaan usulan kepada OPD dapat disampaikan lebih awal
		7. Masih adanya kesalahan penatausahaan keuangan	7. SDM pengelola keuangan OPD yang belum memadai	7. Dapat diusulkan formasi tenaga pengelola keuangan atau dilakukan pendistribusian secara proposional tenaga tersedia
		8. Masih terdapatnya selisih mutasi transfer masuk dan keluar	8. Pemahaman dan ketelitian petugas pengelola keuangan yang masih kurang	8. Adanya bimtek / pelatihan bagi pengelola keuangan OPD
		9. Pembahasan Laporan Keuangan di DPRD yang terkadang tidak sesuai jadwal yang ditentukan sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target tanggal penetapan laporan	9. Belum adanya komitmen bersama dalam melaksanakan jadwal/siklus penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD	9. Adanya tuntutan penyediaan laporan keuangan tepat waktu dan dapat dikoordinasikan dengan lebih baik
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Pemanfaatan BMD oleh Pihak ketiga belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM	1. Keterbatasan Jumlah SDM.	1. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pelaksanaan pemanfaatan oleh pihak ketiga lebih maksimal.

		2. Pengamanan BMD Pemagaran terkendala anggaran	2. Keterbatasan Anggaran	2. Perlu adanya anggaran untuk kegiatan pemagaran
		3. Adanya keterlambatan dalam pendataan aset daerah	3. Keterbatasan Jumlah SDM pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah	3. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pendataan aset daerah lebih cepat
		4. Adanya keterlambatan beberapa OPD dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah	4. Kurangnya koordinasi OPD pengguna Barang Milik Daerah	4. Perlu adanya Sosialisasi terkait Pelaporan Barang Milik Daerah
		5. Belum tersedianya Gudang Penyimpanan untuk barang yang akan di lelang/di hapus	5. Lelang Barang Milik Daerah berpotensi menimbulkan masalah kehilangan barang dengan tidak adanya gudang penyimpanan	5. Diupayakan jika memungkinkan untuk dibangun Gudang Penyimpanan Barang
		6. Pemerintah Kabupaten Gresik belum mempunyai SDM Penilai Barang	6. Penilaian Barang Milik Daerah masih bergantung pada bantuan pihak luar (penilai dan DJKN / KPNL) sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai schedule menunggu jadwal kesediaan dari instansi dimaksud dan sifatnya terbatas	6. Diupayakan PEmerintah Kabupaten Gresik agar merekrut Pegawai dengan Kompetensi Penilaian atau membekali SDM yang ada lewat pendidikan dan pelatihan

		7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	7. Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran / PPK dengan Pengelola Barang di OPD	7. Rekonsiliasi internal antara bendahara keuangan / PPK dengan pengurus barang OPD dilakukan secara rutin
		8. Pencatatan Barang Milik Daerah kurang akurat	8. Belum adanya keselarasan kompetensi pengurus barang milik daerah di OPD	8. Dilaksanakannya bimbingan teknis bagi pengurus barang daerah
		9. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum optimal	9. Belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku	9. Adanya update pada modul aplikasi secara berkala
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1. Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat	1. Keterbatasan SDM pelaksanaan pendataan potensi pajak daerah	1. Ketersediaan berbagai lembaga survey / perguruan tinggi yang dapat diajak bekerja sama
		2. Belum tercukupinya regulasi dan Sisdur terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah	2. Keterbatasan SDM yang berkompeten	2. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		3. Kurangnya SDM yang menguasai bidang Teknologi informasi	3. Pemetakan ASN belum sesuai dengan Kemampuan	3. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya

		4. Data pajak yang diberikan oleh wajib pajak belum semuanya valid	4. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	4. Masih banyak WP yang kooperatif
		5. Kurangnya alat yang memadai atau spesifikasi dalam komputer yang kurang sesuai dengan kebutuhan	5. Keterbatasan Anggaran untuk belanja komputer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	2. Perlu adanya anggaran untuk belanja komputer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan
		6. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan pajak daerah belum optimal	6. Rendahnya kualitas pemutakhiran data status objek pajak	6. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		7. Sulitnya melakukan penagihan kepada wajib pajak PBB yang kurang jelas	7. Wajib pajak selalu menjanjikan akan membayar dalam waktu dekat	7. Adanya dukungan kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB
		8. Data PBB dan BPHTB belum semuanya valid	8. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	8. Masih banyak WP yang kooperatif
		9. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan PBB dan BPHTB belum optimal	9. Belum adanya sistem monitoring, evaluasi pengawasan kinerja pemungutan pajak daerah yang berkesinambungan	9. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak

		10. Pelaksanaan koordinasi internal maupun dengan instansi lain terkait penertiban obyek PBB dan BPHTB belum optimal	10. Koordinasi yang belum berkesinambungan	10. Adanya dukungan instansi terkait dalam beberapa pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD
		11. Kurangnya kompetensi Sumber daya manusia yang melaksanakan Pelayanan PBB	11. Rendahnya Pemahaman Petugas Pelayanan terhadap tugas dan fungsinya	11. Adanya Penawaran dari berbagai instansi/ Penyelenggaraan Diklat / Bimtek terkait PBB
		12. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan	12. Adanya keterbatasan anggaran	12. Sarana dan prasarana yang masih dapat difungsikan dilakukan pemeliharaan dengan baik
		13. Belum tercukupinya sarana dan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat	13. Layanan informasi yang belum berfungsi optimal	13. Masih dilakukannya penataan layanan informasi secara bertahap
		14. Belum adanya kesesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB dengan kondisi Riil	14. Belum dilakukannya penyesuaian NJOP terhadap harga pasar	14. Dilakukannya pemutakhiran nilai ZNT di Kabupaten Gresik pada 18 Kecamatan
		15. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum optimal	15. Belum terintegrasinya seluruh system pengelolaan keuangan yang ada	15. Masih dilakukannya penetapan integrasi sistem pengelolaan keuangan secara bertahap

		16. Pelaksanaan verifikasi surat pemberitahuan dan penetapan Pajak Daerah dengan Subjek dan Objek Pajak daerah belum optimal	16. Belum adanya evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan	16. Tersedianya sumber daya untuk verifikasi / pemeriksaan terhadap objek / subjek pajak daerah
		17. Sulitnya melakukan Penagihan karena data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB kurang jelas.	17. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	17. Adanya dukungan Kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB

1.6 Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja sekretariat daerah Kabupaten Gresik selama tahun 2023, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran ini berisi data dukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bagian – bagian dari Rencana Strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.2 CASCADING KINERJA

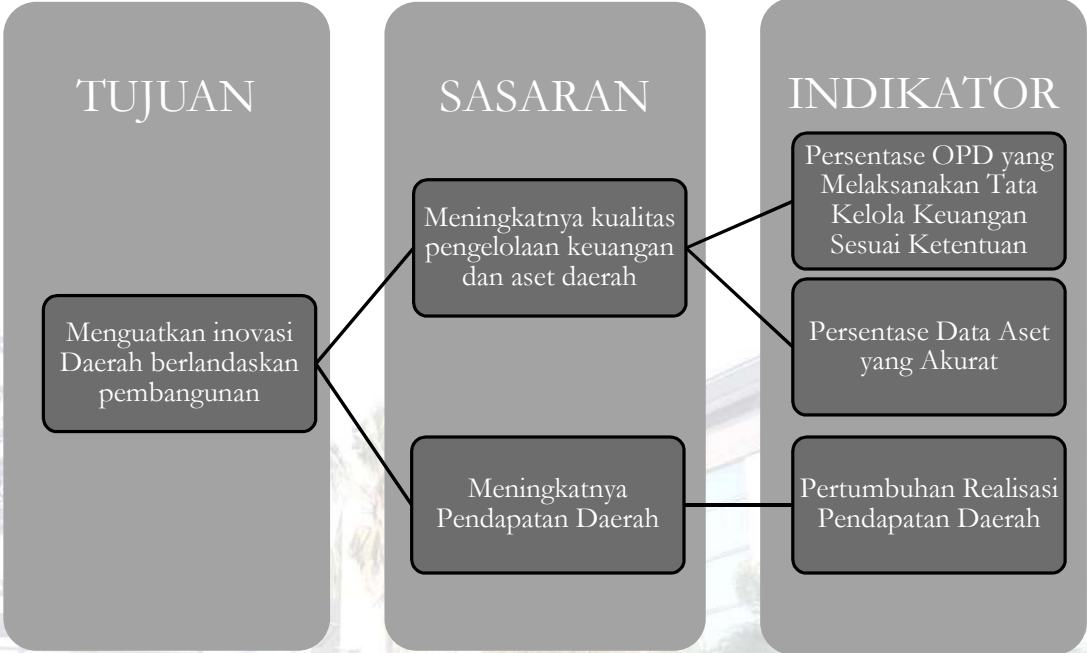
Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.

TUJUAN 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 2 : Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan
Indikator : Indeks Inovasi Daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah



2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah PD yang Melaksanakan tata Kelola Keuangan / Jumlah Total PD x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Data Aset yang Akurat	100% dikurangi(((Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan unaudit dikurangi Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dibagi Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dikali 100%)	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	((Pendapatan Daerah Tahun n - Pendapatan Daerah Tahun n- 1)/Pendapatan Daerah Tahun n-1) kali 100%	11,29 %	1,95%	3,17%	3,49%	3,56%	3,63%
--------------------------------------	--	--	------------	-------	-------	-------	-------	-------

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada APBD 2023

Halaman 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.M REZA PAHLEVI, A.P
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 11 Januari 2023
PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.


A.M REZA PAHLEVI, A.P
 PEMBINA TK. I
 NIP. 197408031993111001

Halaman 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPPKAD KABUPATEN GRESIK


NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %
		2	Persentase Data Aset yang Akurat	90 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3.17 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 68,982,719,814	APBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 895,243,935,000	APBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 3,348,465,800	APBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 5,059,785,800	APBD
Jumlah			Rp. 972,634,906,414	

Gresik, 11 Januari 2023
PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.


A.M REZA PAHLEVI, A.P
 PEMBINA TK. I
 NIP. 197408031993111001

2. Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada Perubahan APBD 2023

Halaman 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.M REZA PAHLEVI, A.P
 Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
 Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 15 Nopember 2023

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH



PIHAK KEDUA
 BUPATI GRESIK

 H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Halaman 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BPPKAD KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %
		2 Persentase Data Aset yang Akurat	90 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3.17 %

No	Kode Rekening	Program	Angaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 55,704,791,723	PAPBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 889,667,684,894	PAPBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2,230,699,264	PAPBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 5,812,745,600	PAPBD
Jumlah			Rp. 953,415,921,481	

Gresik, 15 Nopember 2023

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH



PIHAK KEDUA
 BUPATI GRESIK

 H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA BPPKAD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan Bupati Gresik Tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana berikut :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% - <100%	Sangat Tinggi
2	76% - < 90%	Tinggi
3	66% - < 75%	Sedang
4	51% - < 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Perjanjian Kinerja

Adapun tingkat capaian indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 dapat diukur melalui indikator kinerja dengan target Perjanjian Kinerja pada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Di BPPKAD Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
Menguatkan Inovasi Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	99,99%	111%
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,17%	1,48%	46,69%

Berdasarkan tabel diatas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah capaian kinerjanya masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”** untuk Sasaran Kinerja “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”. Dan untuk Sasaran Kinerja “Meningkatnya Pendapatan Daerah” capaian kinerjanya masuk dalam kategori **“Sangat Rendah”**.

3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	100,12%	111%	90%	99,99%	111%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	1,95	7,45	382%	3,17%	1,48%	46,69%

Dari tabel diatas untuk 3 Indikator Kinerja tahun 2023 ada 2 Indikator Kinerja yang Capaiannya tetap / stagnan (tidak meningkat maupun menurun) sedangkan ada 1 Indikator Kinerja yang Capaiannya menurun dari tahun 2022. Dan untuk hasil dari 3 Indikator Kinerja tahun 2023, ada 2 Indikator Kinerja masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”** yaitu Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan

Sesuai Ketentuan dan Persentase Data Aset yang Akurat . Sedangkan, ada 1 Indikator Kinerja masuk dalam kategori **“Sangat Rendah”** yaitu Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah . Berbeda dengan tahun 2022 semua Indikator Kinerja masuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”**.

3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8=5/7*100
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	600%	16,67%
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	100,12%	111%	540%	18,54%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	1,95%	7,45%	382%	27,09%	27,50%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8=5/7*100
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	600%	16,67%
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	99,99%	111%	540%	18,52%

2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,17%	1,48%	46,69%	27,09%	5,46%
---	--------------------------------	---	-------	-------	--------	--------	-------

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi (Jawa Timur)

Pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditargetkan ada 3 Sasaran Strategis, salah satu Sasaran Strategisnya yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur. Salah satu tujuannya adalah mendapat Nilai Opini BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sama dengan salah satu tujuan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik 2023. Berikut disampaikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 antara BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan BPPKAD Kabupaten Gresik

Sasaran Strategis	Program` Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
BPKAD Provinsi Jawa Timur					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP
BPPKAD Kabupaten Gresik					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan data diatas, Indikator Kinerja pada BPKAD Provinsi Jawa Timur dan BPPKAD Kabupaten Gresik mempunyai realisasi yang sama dalam 2 tahun terakhir yaitu sama-sama mendapat Opini BPK Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya. Hal ini menandakan bahwa Indikator Kinerja, Target dan Realisasi dari BPPKAD Kabupaten Gresik sudah selaras dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Adapun setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam Sasaran Strategis untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Ketepatan Waktu penyusunan Dokumen Penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengelolaan Keuangan khususnya standar Akuntansi Pemerintahan harus sesuai dengan perundang-undangan Efektivitas sistem pengendalian intern
		Persentase Data Aset yang Akurat	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penanggungjawab Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku Melakukan sinkronisasi yang lebih teliti data aset saat pencatatan aset
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Efektifitas pendapatan Daerah Rasio Kemandirian Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif Pajak Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak daerah maupun pendapatan dari sumber lain yang ada agar bisa mencapai indeks kemandirian fiskal yang diinginkan / sangat mandiri

3.6 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik terdapat dua sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023, makadana besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG	ANGGARAN 2023		
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	945.372.476.617	824.414.820.056	87,21%
		Persentase Data Aset yang Akurat	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.230.699.264	1.618.386.515	72,55%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.812.745.600	4.019.124.984	69,14%

3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Kinerja Yang Telah Dicapai

Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG	KINERJA 2023			ANGGARAN 2023			EFISIENSI
				Target	Realisasi	Capaian	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	945.372.476.617	824.414.820.056	87,21%	12,79%
		Persentase Data Aset yang Akurat	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	99,99%	111%	2.230.699.264	1.618.386.515	72,55%	27,45%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,17%	1,48%	46,69%	5.812.745.600	4.019.124.984	69,14%	30,86%
Rata-rata						85,90%	953.415.921.481	830.052.331.555	87,06%	23,70%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Capaian Kinerja 2023 yaitu sebesar 85,90%. Untuk Capaian Anggaran 2023 dari 2 Sasaran Strategis mencapai 87,06%. Sedangkan dari hal efisiensi penggunaan Anggaran sendiri mencapai 23,70% dari rata-rata total capaian melalui Realisasi Anggaran terhadap Pagu Anggaran yang tersedia.

SASARAN I Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran strategis pertama pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari dua indikator yang dipertanggungjawabkan oleh dua bidang pengelolaan keuangan dan satu bidang pengelolaan aset. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
	Persentase Data Aset yang Akurat	90%	99,99%	111%

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan sasaran strategis pertama pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berfokus pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik. Indikator pertama yaitu Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan merupakan indikator yang bertujuan mengelola segala hal yang berkaitan tentang keuangan baik merupakan penganggaran, pencairan sampai pelaporan pertanggungjawaban keuangan sedangkan indikator kedua yaitu Persentase data aset yang akurat dengan tujuan penatausahaan aset daerah dari hal pencatatan, pengelolaan hingga pelaporan barang milik daerah.

Pelaksanaan tata kelola keuangan pemerintah daerah merupakan suatu kegiatan yang telah diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan rekonsiliasi setiap bulan yang selalu diadakan oleh bidang perbendaharaan guna memantau jalannya pengelolaan keuangan Perangkat Daerah. Selain rekonsiliasi setiap bulan, kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan melalui koordinasi dan sosialisasi yang dibebankan oleh bidang anggaran.

Upaya menyelesaikan kendala-kendala yang dialami tentunya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik akan menerapkan beberapa upaya dalam pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya agar menjadi lebih baik lagi, yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi kebijakan akuntansi dan penyusunan modul Laporan Keuangan secara berkala;
2. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait penatausahaan keuangan pada perangkat daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
4. Melakukan sinkronisasi yang lebih teliti data aset saat pencatatan aset;
5. Meningkatkan intensitas rekonsiliasi aset dengan perangkat daerah secara periodik (baik setiap triwulan maupun setiap semester);
6. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan perangkat daerah selaku penanggungjawab BMD sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
7. Meningkatkan koordinasi yang intens dengan pihak DJKN Kantor Wilayah Jawa Timur

SASARAN II

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Pada sasaran strategis kedua ini terdapat satu indikator yang diampu oleh bidang pendapatan, yaitu bidang pajak daerah lainnya, bidang PBB dan BPHTB serta bidang pengembangan dan informasi pendapatan daerah. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3,17%	1,48%	46,69%

Meningkatnya pendapatan daerah merupakan sasaran strategis kedua pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berfokus pada bidang pendapatan dengan program pengelolaan pendapatan daerah. Indikator pada sasaran kedua ini adalah Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah merupakan indikator yang bertujuan meningkatkan realisasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan upaya untuk mengoptimalkan pajak daerah ini dipengaruhi oleh beberapa hal, baik yang menjadi pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor pendukung optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Sumber Daya Manusia;
2. Kerjasama yang baik antar bidang maupun instansi;
3. Hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat;
4. Himbauan pembayar-an pajak melalui media cetak, media elektronik dan media social

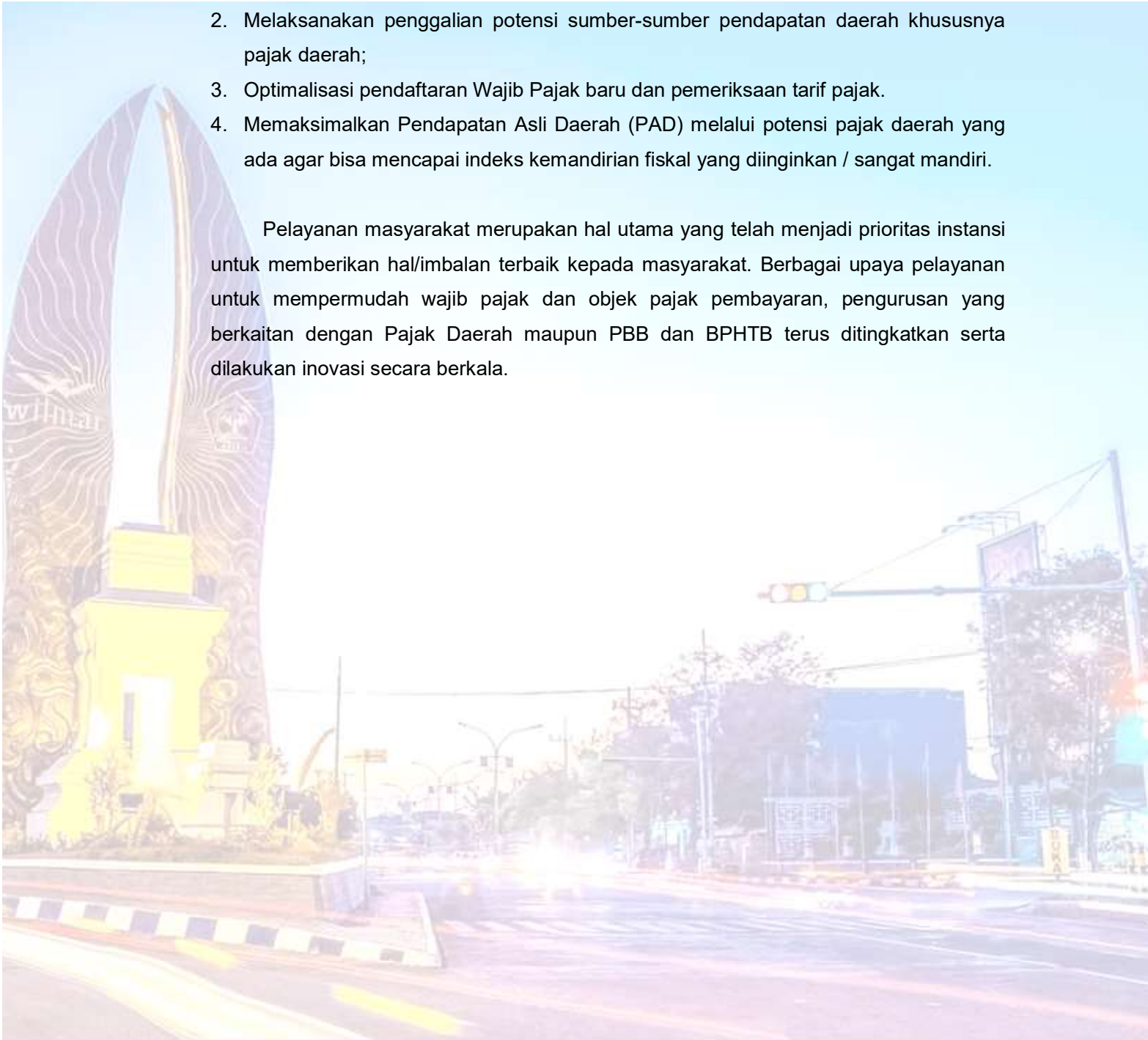
Sedangkan faktor-faktor penghambat optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah;
2. Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik yang belum menentu akibat pandemi;
3. Tidak terealisasinya penagihan secara langsung dari lapang ke lapangan akibat pembatasan.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Intensifikasi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah;
2. Melaksanakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah;
3. Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif pajak.
4. Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak daerah yang ada agar bisa mencapai indeks kemandirian fiskal yang diinginkan / sangat mandiri.

Pelayanan masyarakat merupakan hal utama yang telah menjadi prioritas instansi untuk memberikan hal/imbalan terbaik kepada masyarakat. Berbagai upaya pelayanan untuk mempermudah wajib pajak dan objek pajak pembayaran, pengurusan yang berkaitan dengan Pajak Daerah maupun PBB dan BPHTB terus ditingkatkan serta dilakukan inovasi secara berkala.



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik atas pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat diinformasikan bahwa capaian indikator kinerja dua sasaran strategis menunjukkan keberhasilan atau capaian kinerjanya **>100%** untuk sasaran strategis I (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan kategori **"Sangat Tinggi"** dan belum tercapai untuk sasaran strategis II (Meningkatnya Pendapatan Daerah) hanya sebesar **46,69%** masuk kategori **"Sangat Rendah"**. Sedangkan untuk capaian Anggaran sebesar **87,06%** dengan kategori **"Tinggi"** dan rata-rata efisiensi sebesar **23,70%**. Pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 953.415.921.481 dan terealisasi sebesar Rp 830.052.331.555 atau 87,06%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 untuk sasaran strategis I (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan untuk sasaran strategis II (Meningkatnya Pendapatan Daerah) capaian kinerjanya masih belum tercapai atau masuk kategori sangat rendah. Salah satu faktornya adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah strategis melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Salah satu hal yang bisa diharapkan yaitu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah maupun pendapatan lainnya. Untuk membangun indeks kemandirian fiskal (IKF) yang Sangat Mandiri maka suatu daerah diharapkan bisa membiayai

sendiri kegiatan Pemerintah Daerah tanpa bergantung bantuan dari luar, termasuk Pemerintah Pusat. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2023 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari rencana pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat diminimalkan serta diupayakan berbagai solusi untuk mengatasinya.

SARAN

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi serta membuat kebijakan yang efektif untuk semua lini / sektor yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Melakukan perbaikan untuk tahun berikutnya apabila ada sasaran / tujuan strategis yang belum tercapai di tahun 2023 ini.
3. Melakukan Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Melakukan Evaluasi terhadap Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pemberian Reward dan Punishman terkait Capaian Kinerja sehingga dapat memotivasi untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada APBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.M REZA PAHLEVI, A.P
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja, jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 11 Januari 2023
PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A.M REZA PAHLEVI, A.P
PEMBINA TK. I
NIP. 197408031993111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPPKAD KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		1	2	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Kebijakan	100 %
		2	Persentase Data Aset yang Akurat	90 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3.17 %


No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 68,982,719,814	APBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 895,243,935,000	APBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 3,348,465,800	APBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 5,059,785,800	APBD
Jumlah			Rp. 972,634,906,414	

Gresik, 11 Januari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


H. FANDI AKHYAD YANI, S.E.

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH


A.M REZA PAHLEVI, A.P.
PEMBINA TK. I
NIP. 197408031993111001

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD pada Perubahan APBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.M REZA PAHLEVI, A.P

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 15 Nopember 2023

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEWANGCANAAN ASET DAERAH



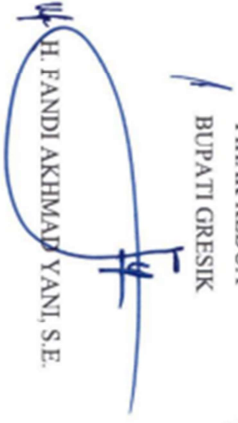
NRP. 1972408031993111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BPPKAD KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan 2 Persentase Data Aset yang Akurat	100 % 90 %	
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	3.17 %	
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 55,704,791,723	PAPBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 889,667,684,894	PAPBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 2,230,699,264	PAPBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 5,812,745,600	PAPBD
Jumlah			Rp. 953,415,921,481	

Gresik, 15 Nopember 2023

PIHAK KEDUA
 BUPATI GRESIK


 H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.



KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
 KEMUNGKINAN ASET DAERAH

PIHAK KESATU


 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
 AEM RIZATYANIL EVI, A.P.
 PEMERINIA/TK. 1
 NIP. 197408031993111001